



Subag Humas dan TU  
BPK Pwk. Prov. Sulawesi Tengah

Tahun :

2	0	1	7
---	---	---	---

Bulan :

1	2	3	4	5	✓	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tanggal :

1	2	3	4	5	✓	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Entitas :

Provinsi	Palu	Donggala	Tolitoli	Buol	Sigi	Morowali Utara	Parigi Moutong	Poso	Morowali	Tojo Una-una	Banggai	Banggai Kepulauan	Banggai Laut
----------	------	----------	----------	------	------	----------------	----------------	------	----------	--------------	---------	-------------------	--------------

Opini Bukanlah Jaminan Tidak Ada Penyelewengan

# Opini Bukanlah Jaminan Tidak Ada Penyelewengan

**SULTENG RAYA** - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tengah mengatakan opini yang dikeluarkan terhadap pengelolaan keuangan daerah bukanlah jaminan tidak adanya penyelewengan bahkan tindak pidana. Hal itu dikatakan Kepala BPK RI Perwakilan



Baca **OPINI** Hal. 7

**BAYU SABHARTA**

**OPINI** dari halaman 7

Sulawesi Tengah Bayu Sabharta usai menyorotkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap empat kabupaten di Sulawesi Tengah, Senin (3/8/2017) siang di Kantor Perwakilan BPK RI, Jalan Muhammad Yasmin, Kota Palu.

Menurut Bayu, selaman hasil pemeriksaan sudah sampai terjadi kerugian keuangan negara dan tanggung jawab pidana, maka laporan akan diserahkan kepada penegak hukum.

Empat kabupaten yang menerima LHP adalah Kabupaten Buol dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Kabupaten Sigi dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Banggai Kepulauan dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Morowali Utara, juga opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Bayu mengapresiasi pemerintah kabupaten Buol yang bisa memperbaiki pengelolaan keuangannya hingga mendapat opini WTP. Sedangkan tiga kabupaten lainnya yang mendapat opini WDP diminta untuk terus memperbaiki sistem dan pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Bayu, hal yang menjadikan opini pengecualian adalah pengakuan aset tetap yang belum terakumulasi, masalah pengelolaan utang BOG yang belum terakumulasi dan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan penyalang-undangan yang mengakibatkan ketidakjelasan daerah (termasuk dalam keterlambatan).

Dari hasil laporan pemeriksaan keuangan daerah, ada ditemukan ketidaksesuaian terhadap keempat kabupaten, yakni Kabupaten Sigi sebesar Rp7,6 miliar lebih dan telah dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp3,3 miliar lebih, sisa yang belum dikembalikan Rp2,3 miliar lebih.

Kabupaten Banggai Kepulauan ditemukan ketidaksesuaian sebesar Rp5,9 miliar lebih dan baru dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp100 juta lebih, sehingga masih tersisa Rp5,8 miliar lebih.

Sementara Kabupaten Morowali Utara terdapat ketidaksesuaian sebesar Rp3,3 miliar lebih, sudah dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp251 juta lebih sehingga masih tersisa Rp2,9 miliar lebih.

Terakhir, Kabupaten Buol, Moski mendapat pendapat WDP, tetapi saja ada temuan sebesar Rp1,7 miliar lebih, sudah dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp752 juta lebih dan masih tersisa Rp225 juta lebih.

Menyampi opini WTP itu, Bupati Banggai Kepulauan FE Zaimal Muis mengatakan akan menjalukannya sebagai petataran.

"Kami baru ditantik sekitar 13 hari. Tapi hal ini kami jadikan cambuk agar ke depannya pengelolaan keuangan daerah kami akan menjadi lebih baik dan sesuai standar," ujar Zaimal Muis didampingi Wakil Bupati H Bas Adam 990